



Photo credit: Irwansyah, WWF project

**Manajemen Air Berkelanjutan:
Studi Kasus Forum PSDAT
(Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu)**

I. Konteks Situasional

Indonesia sangat rentan terdampak oleh perubahan iklim, yang berpotensi mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat serta menimbulkan ancaman bencana lainnya. Perubahan iklim pada umumnya dapat diukur dengan kenaikan suhu dan curah hujan. Kenaikan suhu mengancam terjadinya cuaca ekstrem yang dapat dilihat dengan tingkat curah hujan, kecepatan angin, kenaikan air laut, kekeringan dan banjir. Pada sektor air perubahan iklim akan menyebabkan kekurangan air tanah dan kenaikan permukaan air laut yang dapat memengaruhi ketersediaan air. Kekurangan air juga dapat menyebabkan kegagalan panen karena matinya lahan produktif atau tidak menghasilkan karena ancaman kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Kekeringan juga akan membawa dampak pada ketersediaan air, sanitasi dan kesehatan (*water, sanitation, hygiene/WASH*) yang berpengaruh pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terutama kaum rentan, seperti anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas dan lansia. Selain itu, terjadinya krisis air seperti minimnya akses pada sumber air dan sanitasi, matinya sumber air karena ancaman bencana, kualitas air yang buruk karena polusi dan terjadinya degradasi ekosistem dan matinya keanekaragaman hayati juga menjadi ancaman.



Photo credit: Kevin Mahu, WFW Project

Penanaman anakan pohon sebagai bagian dari Adaptasi Perubahan Iklim.

Perubahan iklim saat ini tengah menjadi sorotan dunia, di mana dampak yang dihasilkan berpotensi merusak akses dan layanan air minum, sanitasi, dan higienitas (WASH) dalam skala besar. Dampak ini diprediksi akan terus bertambah di kemudian hari, dan berimplikasi pada target-target pemenuhan akses dan layanan WASH yang telah dimandatkan oleh pemerintah dalam RPJMN tahun 2024 dan SDGs di tahun 2030. Oleh karena itu, diperlukan pola adaptasi yang terkelola dengan baik terutama pada sektor WASH.

Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan dua kabupaten yang menjadi target pelaksanaan program Water for Women dan dalam prosesnya telah berkolaborasi lintas sektor dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat organisasi disabilitas dan sektor swasta, untuk mendorong terbentuknya forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT). Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Jumlah hari hujan dan curah hujan yang cukup rendah berdampak pada kekeringan, kekurangan air, dan mengancam matinya beberapa sumber air. Akibatnya terlihat respon kekeringan tahunan dengan bantuan air bersih yang diberikan pemerintah kabupaten hampir setiap tahunnya.

Rendahnya curah hujan, dan hari hujan yang minim, juga dipengaruhi oleh penguapan pada air laut (evaporasi) karena Kabupaten Sumbawa memiliki lautan yang luas daripada daratan.

Berbeda dengan topografi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Manggarai memiliki topografi berbukit-bukit, daerah pesisir dan daratan rendah sehingga suhu udara cukup rendah di antara

10 sampai dengan 24°C. Dengan wilayah pengunungan yang cukup luas. (Sumber: <https://mpigkafm.com/kondisi-geografis-dan-keunikan-kabupaten-manggarai-flores-indonesia>).

Kabupaten Manggarai mengalami curah hujan dan hari hujan yang tinggi dengan rata-rata 150-300mm, dan dapat dikatakan tidak memiliki kekurangan air karena memiliki 2.000 mata air. Pengelolaan air bersih untuk rumah tangga dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Tirta Komodo yang menjamin ketersediaan air minum bersih bagi masyarakat. Namun, melalui pendampingan program Water for Women ditemukan masih banyak masyarakat yang merasa kekurangan air, walaupun bisa dikatakan kota ini hampir tidak mengalami kekeringan. Kurangnya ketersediaan air minum juga dipengaruhi oleh pola penggunaan air yang tidak tertata dengan baik, rusaknya sumber mata air dan debitnya yang menurun yang dipengaruhi oleh kurangnya perlindungan pada mata air, dan penebangan pohon-pohon pelindung mata air untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Kondisi ketersediaan air yang berbeda pada dua kabupaten ini, program Water for Women mendorong adanya forum PSDAT untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang mengutamakan perencanaan, perlindungan alam, pengembangan dan pengelolaan air serta lingkungan sehingga dapat meningkatkan kondisi ketersediaan air, sanitasi dan kesehatan yang memadai dan tahan dari dampak perubahan iklim. Forum ini juga memastikan adanya kolaborasi para pemangku kepentingan yang berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya air dan mengatasi dampak perubahan iklim dan pencegahan bencana. Berdasarkan Studi Analisis Risiko Sumber Daya di Kabupaten Manggarai, 2023 menyatakan bahwa tujuan pembentukan forum PSDAT adalah untuk mengidentifikasi kegiatan dan strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang menjamin peningkatan akses dan layanan sanitasi & kebersihan yang setara dan berkelanjutan bagi semua pihak, serta mendorong partisipasi aktif kelompok-kelompok yang terpinggirkan sehingga mereka mampu menuntut hak-hak mereka terkait sanitasi dan kebersihan dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Dengan pelibatan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya air maka akan membangun rasa kepemilikan, pemanfaatan air secara bijaksana dan mampu memelihara serta melindungi sumber daya air.

II. Water For Women

Dalam rangka mendorong ketahanan iklim pada sektor air, sanitasi, dan kesehatan dengan memastikan pencapaian air yang aman dan sanitasi yang layak bagi semua, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melalui program Water for Women mendorong pemerintah kabupaten untuk dapat mengintegrasikan kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang

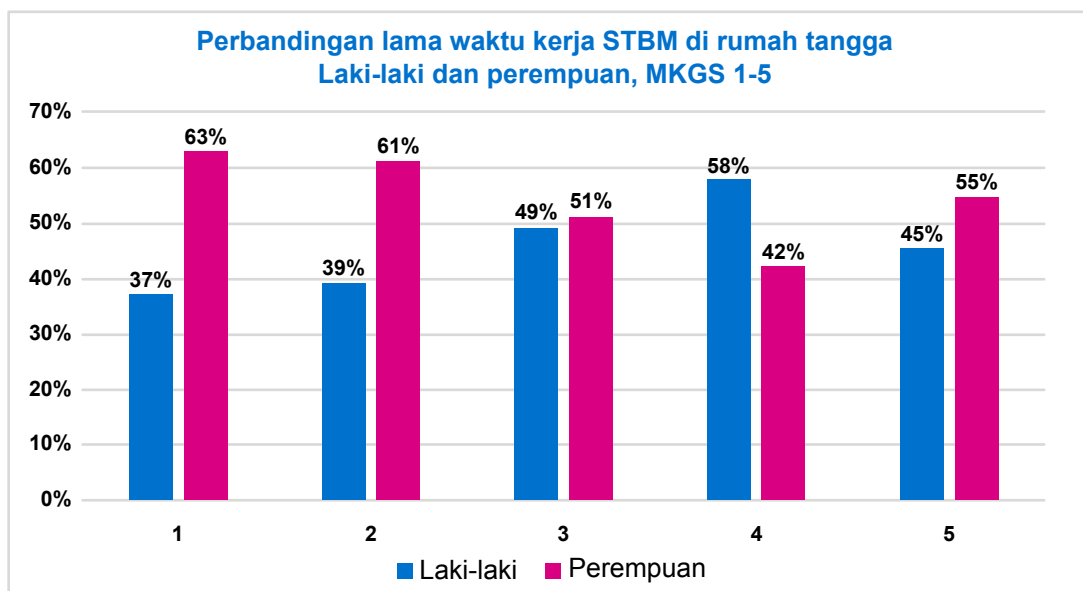
berkesetaraan gender dan inklusi sosial (STBM GESI) ke dalam rencana pembangunan dengan memastikan adanya kolaborasi multi *stakeholder* yaitu pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh adat, organisasi disabilitas, organisasi perempuan, anak dan kaum muda untuk melakukan pengelolaan dan mengurangi risiko dari layanan WASH yang tidak memenuhi standar. Program Water for Women telah diimplementasikan di Kabupaten Sumbawa, NTB, Kabupaten Manggarai dan Kota Kupang, NTT sejak 2020-2024.



III. Kolaborasi untuk pembangunan yang berkelanjutan

Kabupaten Manggarai mengalami risiko sumber daya air karena debit air hanya tinggi selama musim hujan dan akan menurun pada musim kering sehingga siapa sangka Manggarai menghadapi ancaman kekurangan air dan kualitas air yang menurun. Dalam memenuhi kebutuhan pasokan air bersih dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mampu melayani 30.000 pelanggan, namun, saat ini, debit air menurun dan PDAM mengalami kehilangan pelanggan hingga 10% yaitu 3.000 pelanggan. Masyarakat menyatakan ini sebagai dampak perubahan iklim dan pola masyarakat yang berubah yang menggali sumur bor secara bebas.

Laporan Monitoring Kesetaraan Gender dalam Sanitasi (MKGS 2024) PKK Manggarai menyatakan perubahan iklim telah membawa pengaruh pada pasokan gizi anak-anak dan berpotensi meningkatkan angka masalah tumbuh kembang anak atau stunting karena kekurangan air. Isu air juga membawa dampak tersendiri pada perempuan karena harus membutuhkan tambahan waktu untuk mengakses sumber mata air dan kurangnya debit air juga sangat berdampak pada sektor sanitasi serta kesehatan terlebih saat menstruasi. Berikut diberikan gambaran terkait kesetaraan gender.



Grafik ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki waktu kerja yang lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Dengan perbandingan 63:37 dan perbandingan yang menurun 55:45 perempuan masih mengalokasikan waktunya lebih banyak untuk urusan STBM di rumah tangga.

Kabupaten Sumbawa dengan suhu harian 36°C juga memengaruhi ketersediaan air. Kejadian bencana puting beliung, curah hujan yang tinggi pada musim hujan, sangat berpotensi menyebabkan banjir terutama pada das Moyo. Kekeringan juga diperparah dengan pembukaan lahan (deforestasi hutan di Kecamatan Plampang, Labangka, Empang dan Tarano). Pada tahun 2024, telah terjadi kekeringan di 18 desa. Ada kondisi lain, limbah pupuk dari lahan jagung masuk ke laut dan merusak ekosistem laut. Gambaran pola pertanian, pola tidak ramah terhadap lingkungan semakin memperparah kekeringan dan kurangnya ketersediaan air, setiap tahun BPDB Kabupaten Sumbawa melakukan distribusi air untuk respons pada bencana kekeringan. (sumber: <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Kekeringan-di-SUMBAWA-NUSA-TENGGARA-BARAT-01-11-2023-92>)

Melalui kolaborasi dan dukungan antara pihak, divisi pendayagunaan, PSDAT Manggarai telah melakukan penghijauan di beberapa lokasi di Desa Jaong dan Desa Ngkaer sebanyak 2.324 anakan, dan melakukan penanaman kembali serta perlindungan pada sumber mata air, seperti di hutan Gapong. Hal lain PSDAT Manggarai juga telah memastikan pembuatan sumur bor membutuhkan perizinan hingga provinsi. Proses kolaborasi juga telah dikembangkan dengan pembuatan Rencana Aksi PSDAT dengan menyelaraskan rencana pembangunan daerah, sehingga dapat dikatakan rencana PSDAT dibangun sesuai dengan program dan anggaran pemerintah daerah, seperti pengadaan regen (zat pengujian kualitas air) dan dibagikan kepada 21 Puskesmas untuk survei kualitas air minum melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Begitu juga yang dilakukan di Sumbawa, gencar melakukan edukasi dampak perubahan iklim, seperti kekeringan dan kualitas air yang buruk, konservasi mangrove, pengelolaan sampah untuk penambahan sumber energi dan mengampanyekan stop penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga tidak membawa dampak buruk pada kesehatan masyarakat.

"Forum PSDAT menggandeng pemerintah untuk kerja sama dengan masyarakat kegiatannya menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti investasi untuk masa depan dalam lingkungan. Kegiatannya bernilai positif dan berdampak walaupun belum kelihatan yang penting kita sudah mulai."

Charlenson Z Rihimone, S.Kom
Kepala Dinas DLH, Kab. Manggarai

"Forum PSDAT telah berperan dan mengantisipasi konflik penggunaan air, Melalui divisi kebijakan dan mediasi dapat membantu mengumpulkan dan mensinergikan berbagai kebijakan serta mempertemukan pihak-pihak agar dapat mencapai kesepakatan."

Muttakin
Ketua Forum PSDAT
Kab. Sumbawa

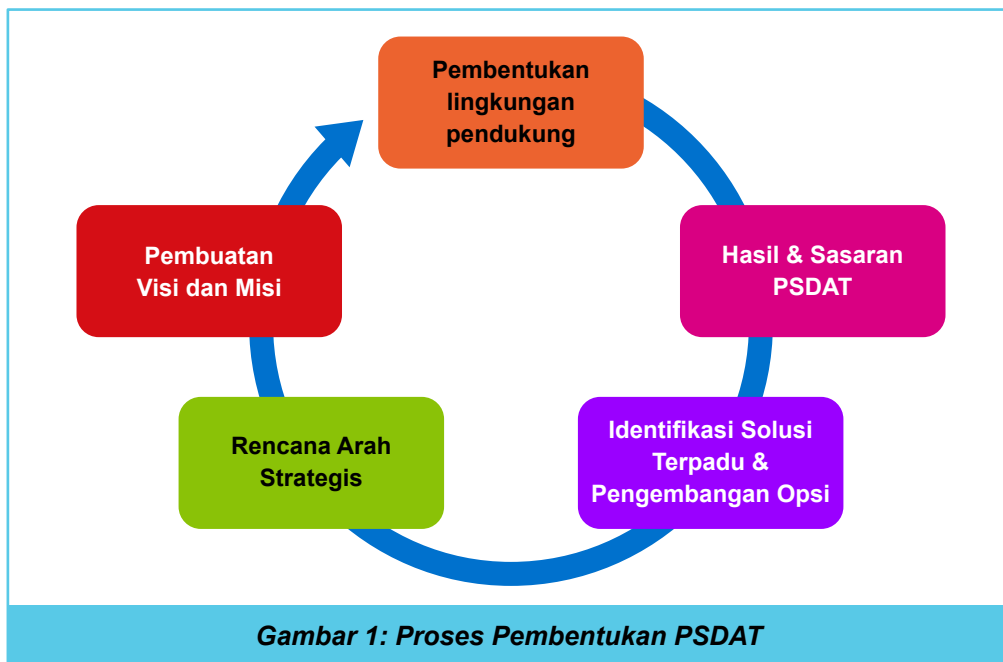
Selama perjalanan 2 tahun PSDAT telah menjadi wadah untuk berkolaborasi untuk adaptasi pada perubahan iklim, selain forum PSDAT, di Manggarai juga memiliki forum air lainnya, seperti forum DAS Waepesi, forum gabungan petani pengguna air; di Sumbawa ada komisi irigasi, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan di tingkat provinsi ada TPKSDA (Koordinasi untuk pengelolaan sumber daya air), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di tingkat desa-kecamatan-kabupaten dan provinsi. Namun, apa yang membedakan dengan PSDAT adalah hal yang dapat ditingkatkan, karena kolaborasi dari semua *stakeholder* dari unsur pemerintah, swasta, tokoh adat, dan tokoh masyarakat membuat PSDAT lebih luas aksesnya dan bisa menjangkau semua wilayah yang berdampak perubahan iklim. PSDAT juga telah mempersiapkan diri untuk menjangkau sektor-sektor pendanaan lainnya, karena banyaknya program dan aktivitas yang relevan dengan perubahan iklim yang membutuhkan bantuan dana sehingga dapat melakukan kegiatan dengan lebih cepat dan dapat meminimalisir dampak yang sudah terjadi.

"Sebagai orang dengan disabilitas, PSDAT ini sangat penting karena bagi kami air adalah faktor utama kehidupan, dan langkah yang dilakukan ini sangat baik sudah melibatkan semua stakeholder (termasuk Konsorsium)."

Sabinus Ngadu
Konsorsium Disabilitas Manggarai.

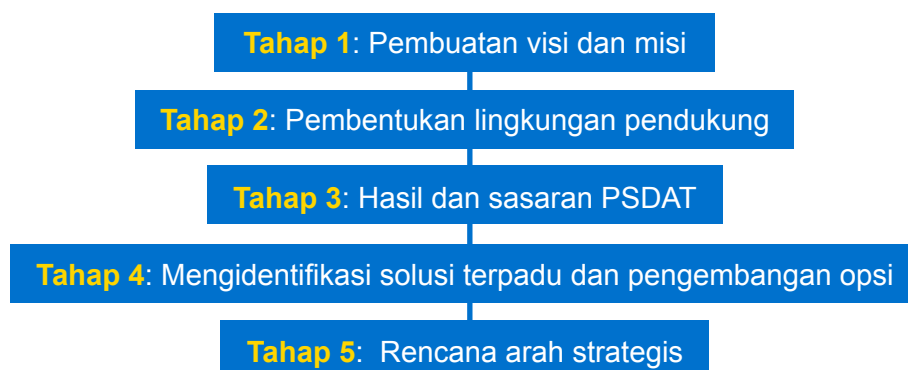
IV. Forum PSDAT

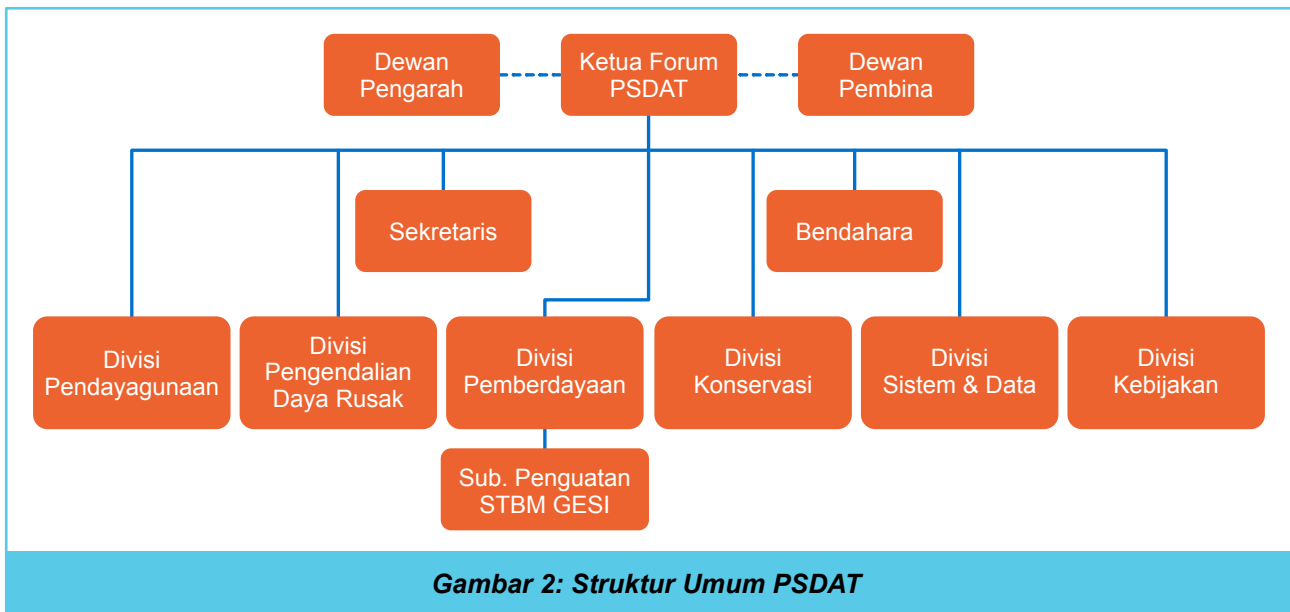
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumbawa, dan Plan Indonesia telah mengupayakan tatakelola sumber daya air secara lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk mendorong ketahanan iklim pada sektor air, sanitasi dan kesehatan melalui forum PSDAT. Forum ini bertujuan untuk menjamin peningkatan pada akses dan layanan air sanitasi dan kesehatan yang setara dan berketahanan bagi semua pihak. Serta mendorong partisipasi aktif kelompok-kelompok masyarakat sehingga mendapatkan kesetaraan terkait akses air, sanitasi dan kebersihan serta menjadi agen perubahan dalam masyarakat untuk mengelola sumber daya air dengan lebih baik dan meminimalisir dampak perubahan iklim.



Proses Pengembangan Forum PSDAT ini dilalui dengan lima tahapan di bawah ini, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan di setiap kabupaten. Forum ini dapat didefinisikan sebagai proses mendorong pengembangan dan pengelolaan air tanah dan sumber daya terkait untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan cara yang adil dengan mendukung keberlanjutan ekosistem.

Langkah yang dilewati dalam pembentukan PSDAT melalui tahapan di bawah ini, dan membutuhkan waktu yang panjang, 4-6 bulan.





Pengembangan PSDAT dipetakan menjadi Divisi Pendayagunaan, Divisi Pengendalian Daya Rusak, Divisi Pemberdayaan, Divisi Konservasi, Divisi Sistem dan Data, Divisi Kebijakan dengan tujuan agar setiap *stakeholder* dalam divisi dapat berkolaborasi dan memetakan analisis kegiatan yang relevan dengan pembangunan dan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang.

Berikut adalah gambaran umum setiap divisi yang dibutuhkan forum PSDAT:

Divisi Pendayagunaan

Divisi ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk mendukung ketahanan iklim di sektor air, sanitasi, dan kesehatan. Divisi Pendayagunaan berfungsi untuk mengembangkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola air, memastikan akses yang setara terhadap layanan air bersih dan sanitasi bagi semua pihak, serta mendorong partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

Divisi Pengendalian Daya Rusak

Divisi ini berfungsi untuk memetakan cara mengurangi risiko kerusakan akibat air, seperti banjir dan longsor, melalui upaya pencegahan dan mitigasi dampak bencana. Divisi ini fokus pada penataan lingkungan dan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana, serta melakukan pemantauan dan pengelolaan wilayah rawan dengan melibatkan masyarakat agar lebih siap menghadapi perubahan iklim dan bencana terkait air.

Divisi Pemberdayaan

Divisi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk untuk melakukan penguatan STBM GESI. Kegiatan yang dilakukan divisi ini adalah melakukan edukasi, pelatihan, dan pengembangan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola air secara berkelanjutan dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Divisi ini juga mendorong masyarakat menjadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan, meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta membangun ketahanan komunitas secara mandiri.

Divisi Konservasi

Divisi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya air melalui pelestarian dan pemulihan ekosistem yang mendukung siklus air. Divisi ini fokus pada upaya perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan, penghijauan, dan pengelolaan kualitas air untuk memastikan keberlanjutan pasokan air. Divisi ini juga mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam praktik konservasi untuk menjaga ekosistem air dari kerusakan, sehingga sumber daya air tetap terjaga bagi generasi mendatang.

Divisi Sistem dan Data

Divisi ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data terkait sumber daya air guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan air. Divisi ini diharapkan bisa membangun sistem informasi yang akurat, pemantauan kualitas dan kuantitas air, serta penyusunan basis data yang komprehensif. Divisi ini juga menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk perencanaan, evaluasi, dan koordinasi antar divisi, sehingga seluruh program dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.

Divisi Kebijakan

Divisi ini bertujuan untuk merumuskan, mengkaji, dan merekomendasikan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Divisi ini fokus pada pengembangan regulasi yang mendukung pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air secara adil dan berkelanjutan, serta mendorong integrasi kebijakan lintas sektor. Divisi ini juga berperan dalam advokasi kebijakan di tingkat lokal hingga nasional, serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Lampiran 1

Contoh Aktivitas PSDAT

Divisi	Kegiatan	Masalah	Kegiatan	Pelaksana	Dasar Hukum	Konteks Wilayah
Pendayagunaan	Penatagunaan (zonasi air tanah, peruntukan air, baku mutu air rumah tangga, pertanian, industri)	<ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi penataan lahan untuk pendaya gunaan air lemah b. Tumpang tindih lahan dalam tata guna air. c. Ada Oknum yang menjadi Provokator dalam pengaturan tata guna Air d. Isu air tidak menjadi Prioritas dalam Politik Lokal. 	Pemetaan Tata Guna Lahan untuk konservasi air yang tegas	Pemda & DPRD		Kab. Manggarai: Barong Wae
	Penyediaan SDAir (irigasi, drainase, jaringan dan pemeliharaan, air rumah tangga, sanitasi dll)	Infrastruktur belum merata di seluruh kecamatan, desa di Manggarai	Politik anggaran yang berpihak pada pemerataan infrastruktur sektor air	Pemda & DPRD		Kab. Manggarai: Hidup sederhana/ Ughari
Pengendalian Daya Rusak	Kolaborasi PMI dan OPD untuk mendukung perlindungan mata air dan DAS	Sejumlah mata air mati dan debitnya menurun, wilayah DAS tidak memiliki pohon penahan	Konservasi dan reboisasi	Dinsos, BPBD, DLHD, KPH, DPRD Divisi 1		BPBD dan PMI
	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana alam bagi orang dengan disabilitas	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait cara menyelamatkan diri dari bencana	Sosialisasi dan peningkatan kesadaran	BPBD, Dinsos, DLHD, KPH dan Konsorsium Disabilitas		BPBD dan Dinso
	Penguatan adaptasi struktural dan non struktural	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya dokumen rencana konstigensi bencana b. Infrastruktur masih banyak yang belum tahan bencana 	Pembuatan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon)	BPBD PUPR		BPBD dan PUPR (Perumahan Rakyat)

Divisi	Kegiatan	Masalah	Kegiatan	Pelaksana	Dasar Hukum	Konteks Wilayah
Pemberdayaan	Pelibatan peran Masyarakat sejak perencanaan	Kurangnya koordinasi/ komunikasi dari pemilik program/ pelaksana kegiatan dengan para Masyarakat, termasuk kelompok rentan.	Mewajibkan pemilik program atau pelaksana kegiatan untuk melakukan koordinasi/ jalin komunikasi sebelum dilakukan kegiatan	Pemilik program dan Dinas terkait.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air UU No. 8 tahun 2016 tentang orang dengan disabilitas Perda No. 6 tahun 2015 tentang kesetaraan dan pemberdayaan disabilitas 	Kab. Manggarai: Lonto Leok
	Monev SDAir berbasis masyarakat	Kurangnya pelibatan masyarakat dan kaum difabel dalam proses monev	Melibatkan masyarakat dan kaum difabel dalam proses Monev	Pemerintah (dinas terkait), Pengelola Program, Kelompok dunia usaha/ pemilik modal.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air UU No. 8 tahun 2016 tentang orang dengan disabilitas, Perda No. 6 tahun 2015 tentang kesetaraan & pemberdayaan disabilitas 	Kab. Manggarai: Lonto Leok
Konservasi	Perlindungan & Pelestarian sumber daya air	<p>a. Meringisnya sumber mata air.</p> <p>b. Menurunnya debit air</p>	Rehabilitasi hutan dan lahan.	Badan lingkungan hidup daerah, Dinas PUPR, BPMPD, Pemdes/ kelurahan, komunitas masy. adat, Lembaga perguruan tinggi, LSM Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> UU tentang Kehutanan UU tentang Konservasi Hutan UU tentang Lingkungan Hidup UU tentang SDA UU tentang Tata Ruang UU tentang Desa UU tentang Masyarakat Adat. 	Kab. Manggarai: Barong Wae
	Pengendalian pencemaran air	Areal sekitar mata air difungsikan sebagai areal pembuangan sampah dan pembangunan MCK	Menyiapkan Lokasi TPS dan pembangunan MCK jauh dari mata air.	Dinas lingkungan hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> UU tentang Lingkungan Hidup UU Sumber Daya Air. 	

Divisi	Kegiatan	Masalah	Kegiatan	Pelaksana	Dasar Hukum	Konteks Wilayah
Sistem & Data	Biofisik	<p>a. Kualitas: banyak mata air yang terkontaminasi, Kerusakan DAS, Kerusakan Hutan, Bangunan Air yang rusak, Sumber Daya Air yang belum dioptimalisasikan, Sanitasi yang buruk</p> <p>b. Kuantitas: Jumlah sumber daya air yang berkurang, Penurunan debit mata air, dll.</p>	Sosialisasi pengelolaan air yang bijak, Penerapan aturan lingkungan hidup dengan tegas, Program sanitasi sehat	Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Perusahaan pengelola Air, Lembaga Pendidikan, dll.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air PP No. 41 pasal 3 tahun 1999 tentang kehutanan Perpres No. 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Perda Provinsi NTT No. 11 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah 	Kab. Manggarai: Barong Wae
Kebijakan dan Mediasi	Mempertemukan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan jika terjadi konflik	Konflik pengelolaan sumber daya air atau pemanfaatan sumber daya air	Koordinasi dan Mediasi	Perwakilan PEMDES, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan PEMDA	<ul style="list-style-type: none"> UU No.37 Tahun 2014 tentang konservasi Tanah dan Air. 	Kab. Manggarai

SK Bupati Pembentukan PSDAT Sumbawa



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 699 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
TERPADU KABUPATEN SUMBAWA PERIODE TAHUN 2022-2026

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Agustus 2022



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SK Bupati Pembentukan PSDAT Manggarai



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR HK/377/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
KABUPATEN MANGGARAI

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI MANGGARAI,



HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT



Photo credit: Plan Indonesia



Sampai semua setara



Yayasan Plan International Indonesia

Komplek Buncit Utama, Kav. 16 , Jl. Warung Jati Barat RT.001/RW.005.

Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12540, Indonesia.

+62 21 2787 3111 +62 21 27876435

www.plan-international.or.id @planindonesia @planindonesia

Plan Indonesia Official Channel Yayasan Plan International Indonesia